

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Goldblatt, D., & ZM, C. A. (2019). *Teori-Teori Sosial Kontemporer Paling Berpengaruh*. IRCiSoD.
- Ismiati, S., Budiman, M., Winayanti, N. K. (2024). *Perlindungan dan Implementasi HAM di Indonesia*. Saghara Publishing.
- Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua. (2022). (n.p.): Prenada Media.
- Muhammad Wali, S. T., Efitra, S., Kom, M., Sudipa, I. G. I., Kom, S., Heryani, A., ... & Sepriano, M. (2023). *Penerapan & Implementasi Big Data di Berbagai Sektor (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 dan Society 5.0)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nasution, A. H., & Kartajaya, H. (2018). *Inovasi*. Penerbit Andi.
- Purwantoro, S. A. (2023). *Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Menyongsong Indonesia Emas 2045*. Indonesia Emas Group.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong, S. H., Ruslan, D. A. R., & SH, M. K. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media.
- Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pembedayaan Petani, Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Indonesia.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Pertanian, Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman, Indonesia

Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Madiun. Indonesia

SUMBER LAINNYA

Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555-561.

Ali, H., Tolinggi, W., & Saleh, Y. (2018). Persepsi Petani terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan di Desa Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 2(2), 111-120.

- Amalik, M. J. (2020). Petani Karawang Melawan Kemiskinan Dalam Kuasa-Politik; Studi Observasi Partisipatif Tahun 2004-2005. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 4(2), 92-101.
- Andiny, P., & Nurjannah, N. (2018). Analisis pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di kota langsa. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 31–37.
- Anwar S. (2024). *Produksi Pupuk Organik, Petani Ditangkap, Lalu Diperas oleh Oknum Anggota Polres Madiun*. Lintas Perkoro Berbagi Informasi & Inspirasi.
- Fadillah, N. (2022). Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 45–65.
- Farah, A. N., Sapitri, E., Juliandini, F. D., Bagaskoro, G. A., Fadillah, I. A. M., Khuzaimah, K., ... & Nugraha, D. M. (2024). Kebijakan pemerintah dalam melemahnya implementasi nilai Pancasila pada era globalisasi. *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 20-27.
- Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 113–119.
- Kurniawan, R. S. (2020). Diskresi Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya. *Airlangga Development Journal*, 4(2), 119-134.
- Musdamayanti, M., Suparto, S., & Zamil, Y. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Petani Terkait Tidak Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Hukum Positif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16133-16146.

- Nugroho, A. B., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Orientasi Belajar terhadap Perilaku Kerja Inovatif yang Mengikuti Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(02).
- Nuryadi, H. D., & Sh, M. H. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394–408.
- Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 89–111.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188.
- Rupang, G. (2023). Relevansi Teori Hak Asasi John Locke Terhadap Penyelesaian Kasus Korupsi di Indonesia. *Seminar Nasional Filsafat 2023*.
- Siahaan, T. R., & Yusuf, H. (2025). Dampak Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi: Kasus Penjualan Pupuk Bersubsidi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 999-1009.
- Sudjana, S. (2021). Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial:- *Dialogia Iuridica*, 13(1), 61-78.
- Suprayitno A. (2024). *Kelangkaan Pupuk Subsidi Masih Jadi Persoalan Petani*. Berita Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Suyatno, S. S. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 197–205.
- Utami, W. (2020). Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum. *Jurnal Maksiagama*, 12(2).